

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan serta data dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi karyawan pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), khususnya dalam kasus yang terjadi di PT. FI. Kesimpulan ini dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan serta sebagai upaya untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terkait pengaturan dan implementasi hak JKN dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia.

1. Pemenuhan Hak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT. FI bahwa terdapat ketidaksesuaian antara regulasi yang mengatur pemenuhan hak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan implementasi yang terjadi di PT. FI. Ketidaksesuaian ini terutama disebabkan oleh kesalahan administratif dalam pelaporan status PHK karyawan, yang mengakibatkan penundaan akses terhadap layanan JKN bagi karyawan yang terkena PHK. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pengaturan hak jaminan pasca pemutusan hubungan kerja yang memberikan keadilan bagi pekerja adalah masih terdapat celah implementasi yang berdampak pada karyawan yang di-PHK. Untuk memberikan keadilan bagi pekerja diperlukan penyederhanaan prosedur administrasi pelaporan PHK, penguatan pengawasan oleh BPJS Kesehatan terhadap kewajiban perusahaan, serta pemberian edukasi kepada perusahaan mengenai pentingnya mematuhi

Fauzan Alsadilla Hermawan, 2025

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK): STUDI KASUS PHK PT. FI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

kewajiban hukum terkait hak JKN. Solusi ini diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi pekerja.

B. Saran

Penelitian ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut mengenai implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di perusahaan lain, serta efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi pekerja pasca PHK. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada:

1. BPJS Kesehatan perlu mengembangkan penyempurnaan sistem pelaporan status PHK yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan sistem perusahaan, Sehingga BPJS Kesehatan lebih mudah dalam pengambilan keputusan yang kondisional.
2. BPJS Kesehatan perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pelaporan PHK oleh perusahaan. Selain itu, edukasi yang berkelanjutan harus diberikan kepada perusahaan tentang pentingnya pemenuhan hak JKN karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau panduan yang mudah diakses untuk memastikan perusahaan memahami dan menjalankan kewajibannya.